SINERGITAS & IMPLEMENTASI TUPOKSI BPTD WILAYAH VIII BANTEN,PENGARUHNYA TERHADAP PENGEMBANGAN SDM

DR. M . Guntur, M.Si
Dosen STTD
Jl. Raya Setu No. 89, Bekasi
Telp./Fax : (021) 8254640

Wawan Darwan, SH, MH
Dosen STTD
Jl. Raya Setu No. 89, Bekasi
Telp./Fax : (021) 8254640

Ir. Juliaman P. M.Si
Dosen STTD
Jl. Raya Setu No. 89, Bekasi
Telp./Fax : (021) 8254640

ABSTRACT

Broadly speaking, the regional BPTD VIII Banten (according to Permenhub 154/2016) with the Type A category, the main task is to carry out the management of road transport, the implementation of ferry ports in commercially operated ports and ports that have not been commercially cultivated. Operational supervision of all Sarpras at the Satker-Satker under the control of Regional VIII Banten BPTD requires competent human resources to meet the fulfillment of land transportation infrastructure (sarpras) services for 24 hours. The Unit of Work Unit under the control of Regional VIII Banten BPTD includes Terminal A Work Unit Unit (4 units), National Road (565 KM), UPPKB (3 units), and Merak-Bakauheni Crossing Work Unit (1 unit). At the operational level, synergy is needed, related to the performance of HR, especially those whose duties are in line with the main tasks and functions) with other institutions that handle the management of Land Transportation infrastructure in Banten Province.

Keywords: Development, Management, Human Resources

Abtraksi

Secara garis besar BPTD wilayah VIII Banten (sesuai Permenhub 154/2016) dengan kategori Type A, tugas pokoknya adalah melaksanakan pengelolaan angkutan jalan, penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersiil dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersiil. Pengawasan operasional terhadap seluruh Sarpras di Satker -Satker dibawah kendali BPTD Wilayah VIII Banten, memerlukan SDM yang kompeten guna memenuhi pemenuhan pelayanan pengelolaan sarana & prasarana (sarpras) Transportasi Darat selama 24 jam. Satuan Unit Kerja dibawah kendali BPTD Wilayah VIII Banten meliputi Satuan Unit Kerja Terminal A (4 unit), Jalan Nasional (565 KM), UPPKB (3 unit), dan Satker Penyeberangan Merak- Bakauheni (1 unit). Pada tataran operasional sangat diperlukan sinergi, terkait dengan kinerja SDM terutama yang tupoksinya seirama dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi) dengan institusi lain yang menangani pengelolaan Sarana prasarana Transportasi Darat di Propinsi Banten.

Kata Kunci : Pengembangan, Pengelolaan, Sumber Daya Manusia,

Pendahuluan
Latar Belakang

Wilayah VIII Banten (sesuai Permenhub 154/2016) dengan kategori Type A, tugas pokoknya adalah melaksanakan pengelolaan angkutan jalan, penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersiil dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersiil (Perintis).

Sedangkan fungsinya adalah melaksanakan fungsi pembangunan, pemeliharaan dibidang LLAJ, ASDP, peningkatan penyelenggaraan & pengawasan terminal penumpang type A, UPPKB (Unit Pengujian Penimbangan Kendaraan Bermotor), kalibrasi peralatan PKB, Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan, Pengawasan Tehnis di Jalan Nasional, Pengujian Berkala, Industri Karoseri serta pelaksanaan Manajemen & Rekayasa Lalulintas, Pengawasan AKAP/AKDP, Angkutan Tidak Dalam Trayek, Angkutan Barang, Penyidikan & Pengawasan Tarif Angkutan, Tupoksi yang sedemikian luas diperlukan strategi dalam mengimplementasikannya, sehingga mampu bersinergi dengan institusi lainnya di Propinsi Banten.

Demikian pula terkait dengan pengawasan operasional terhadap seluruh Sarpras di Satker -Satker dibawah kendali BPTD Wilayah VIII Banten, memerlukan SDM yang kompeten guna memenuhi pemenuhan pelayanan pengelolaan sarana & prasarana (sarpras) Transportasi Darat selama 24 jam.

Satker-Satker dibawah kendali BPTD Wilayah VIII Banten meliputi Satker Terminal A (4 unit), Jalan Nasional (565 KM), UPPKB (3 unit), dan Satker Penyeberangan Merak- Bakauheni (1 unit). Pada tataran operasional sangat diperlukan sinergi, terkait dengan kinerja SDM terutama yang tupoksinya seirama dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi) dengan institusi lain yang menangani pengelolaan Sarpras Transportasi Darat di Propinsi Banten.

Kondisi eksisting SDM di BPTD Wilayah VIII Banten,PNS berjumlah 42 SDM (sudah termasuk pejabat struktural) dan Non PNS 262 SDM. Jumlah tersebut dinilai belum memadai dalam memenuhi standar kebutuhan SDM yang kompeten secara normal, mengingat rentang jangkauan wilayah yang ditangani sebagaimana diuraikan diatas relative luas.

A. Identifikasi Masalah

1. Pertumbuhan penduduk memicu peningkatan kebutuhan akan alat transportasi atau fasilitas transportasi. serta dampak pergerakannya dalam upaya peningkatan

kesejahteraan hidup masyarakatserta tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat, yang mengalir pada kebutuhan transportasi.

2. Pertumbuhan alat transportasi memicu meningkatnya masalah lingkungan berupa polusi udara (tingginya angka emisi sebagai dampak alat transdar)
3. Konsumsi energi BBM memicu naiknya harga kebutuhan rumah tangga.
4. Urbanisasi menjadikan pengembangan kapasitas transportasi antar kota antar propinsi yang segera harus dipenuhi.
5. Munculnya kesenjangan transportasi antara desa dan kota.
6. Berkurangnya ruang publik sebagai akibat bertambah Panjang/luasnya kapasitas jalan.
7. Kemacetan memicu perlambatan manusia untuk beraktifitas serta mengganggu kenyamanan bertransportasi
8. Sangat berkemungkinan adanya tumpang tindih dalam implementasi Tupoksi antar institusi pengelola transportasi darat dilapangan.
9. Belum ada upaya -upaya membangun sinergitas, sehingga tupoksi BPTD Banten terimplementasikan dengan baik.
10. Meningkatnya Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan factor manusia (human error), faktor sarana & prasana, faktor cuaca serta faktor kendaraan.
11. Faktor politik, sering mengintervensi kebijakan pembangunan Sarpras Transportasi.
12. Jumlah SDM Transportasi yang kompeten semakin sangat terbatas, dikarenakan anggaran investasi pembangunan mind-set juga terbatas.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalahnya,sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi BPTD Wilayah VIII Banten mengimplementasikan Tupoksinya sehingga mampu bersinergi dengan institusi lainnya di Propinsi Banten.
2. Bagaimana melakukan pengawasan operasional terhadap Sarpras di Satker - Satker dibawah kendali BPTD Wilayah VIII Banten.
3. Bagaimana bersinergi agar kompetensi SDM berkinerja seirama dengan institusi yang menangani pengelolaan Sarpras Transportasi Darat di Propinsi Banten.

Metodologi Penelitian

A. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian, adalah penelitian lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan (observasi), dan penelitian kepustakaan (download melalui media social, buku-buku, dan jurnal-jurnal) yang relevan dengan judul penelitian.
2. Sumber Data, diperoleh dari pengamatan (observasi dilapangan) yang merupakan data primer, serta penelitian kepustakaan yang merupakan data

skunder yaitu dari data yang diperoleh dari instansi-instansi resmi yang mengeluarkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Tehnik Analisis Data, yaitu dengan 3 corak analisis

(1) Deskriptif, yaitu dengan mendiskripsikan pemahaman berbagai teori sinergi yang relevan dengan pengelolaan Sarpras dan pengembangan SDM.

(2) Komparatif, yaitu membandingkan implementasi penanganan Sarana & Prasana antara Tupoksi Pengelolaan Transportasi Darat serta SDM yang menangani sesuai Tupoksi pada institusi lain yang memiliki job keselamatan transportasi.

A. Pembahasan

1. Sinergitas

Bentuk sinergitas prioritas yang manakah yang relevan dengan Tupoksi BPTD Wilayah VIII Propinsi Banten. Beberapa sinegitas yang seharusnya dilakukan dalam pengelolaan Sarpras Transportasi Darat di Wilayah VIII BPTD Bantenadalah sebagai berikut :

a. *Sinergitas kepentingan strategis,*
b. *Sinergitas Bidang Program,*
c. *Sinergitas Geografi,*
d. *Sinergitas antar wilayah.*
e. *Sinergitas Inform*
f.

2. Struktur Organisasi& Operasional Satker.

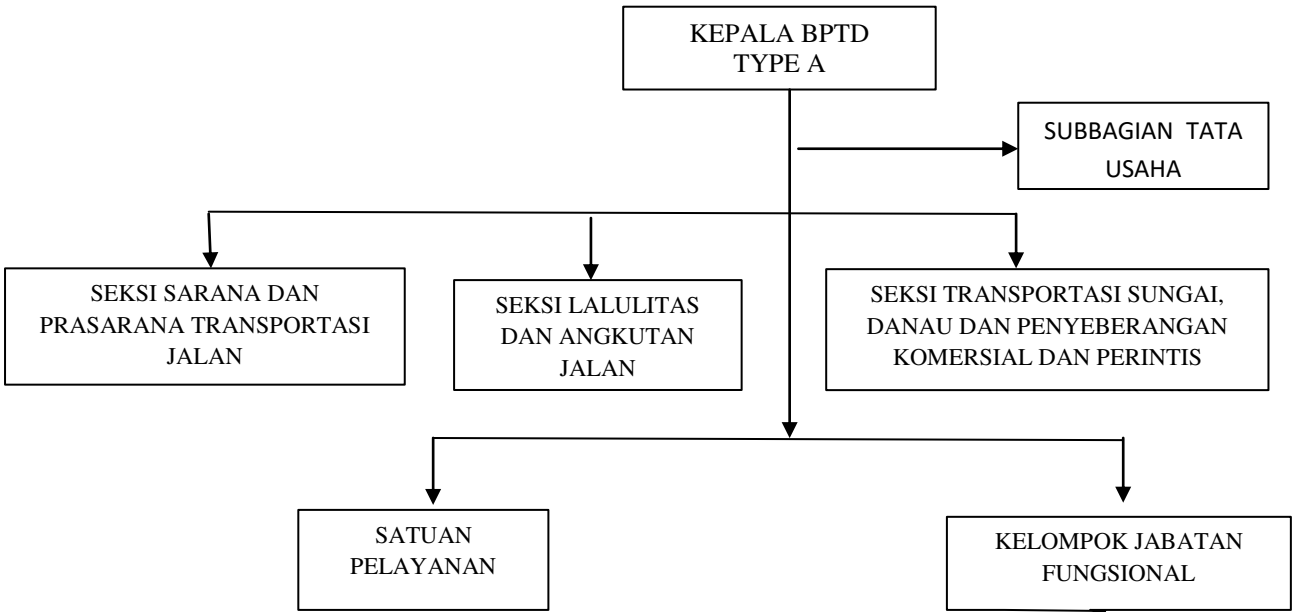

Sesuai Permenhub 154 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPTD , Propinsi Banten masuk dalam wilayah VIII yang telah beroperasi secara efektif adalah:

1. Lokasi Pelayanan sejumlah 1 (satu) Satker ASDP Komersial yaitu Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten – Bakauheni Lampung,

Sinergitas di Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten meliputi :

a. Institusi Kantor Otoritas Pelabuhan Merak Banten dibawah UPT Ditjen Perhubungan Laut yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani Keselamatan Kapal dan Perizinan Berlayar setelah diketahui bahwa kapal penyeberangan tsb Laik Laut.
b. Kepolisian Pengamanan Pelabuhan yang menangani Pengamanan di darat dan dilaut ketika Berlayar Kapal-Kapal Penyeberangan, serta berperan dalam investigasi keamanan barang-barang illegal lainya.
c. BMKG (Badan Meteorologi , Klimatologi & Geofisika), yang senantiasa terus memantau kondisi Cuaca agar Kapal-Kapal yang berlayar taat tidak berlayar bila peingatan terkait informasi cuaca (ombak tinggi) yang membahayakan pelayaran di Selat Sunda.
d. Distrik Navigasi Wilayah Banten & Lampung (UPT Ditjen Perhubungan Laut), yang memberi isyarat-isyarat keberadaan alur pelayaran (rambu-rambu navigasi laut) yang memberi pesan dilarang atau diizinkan dilayari kapal-kapal yang berlayar.

2. Terminal Type ” A “ sejumlah 4 (empat) Satker.

Sinergitas Pengawasan Terminal Type A.

Terminal type A yang berada dibawah struktur BPTD Wilayah VIII Banten meliputi Terminal type A Merak Klas 1 (4 PNS dan 65 non PNS), Terminal Type A Lebak Klas 3 (4 PNS dan 34 Non PNS), Terminal Type A Labuan klas 3 (6 PNS dan 35 non PNS) dan Terminal Type A Pakupatan Klas II (6 PNS dan 76 non PNS). Masing-masing Terminal dipimpin oleh Ketua Satker dalam operasionalisasi kedatangan dan tiba Bus AKAP dan AKDP. Jumlah PNS dan non PNS berbanding terbalik yang seharusnya jumlah pegawai lebih banyak PNS dibandingkan non PNS. Kondisi demikian sering memicu situasi psichologis terutama yang non PNS dengan upah dibawah UMR.

3. Pembangunan & pemeliharaan Sarpras Transportasi Darat di wilayah VIII Propinsi Banten.

Melalui sinergitas dengan institusi terkait seperti Dishub Propinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Propinsi Banten maka akan diperoleh kesamaan visi dan misi dalam hal pelayanan umum Sarpras.
Langkah-langkah dalam konsep perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kerja dan evaluasi secara bersama-sama sehingga meminimalisir tumpang tindihnya implementasi kegiatan. Masing-masing institusi bekerja sesuai Tupoksi yang dijabarkan dalam Peraturan per-UU-an sebagai pijakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

4. Sinergitas sesungguhnya membangun kemitraan bukan membangun garis demarkasi.

(1) Membangun Kemitraan.

Di Propinsi Banten terkait dengan job Keselamatan Transportasi meliputi BPTD Wilayah VIII Banten , Dishub Propinsi Banten, Dishub Kota Madya yang terdapat di Propinsi Banten dan Dishub Kabupaten yang terdapat di Propinsi Banten. Secara implementasi Lembaga-lembaga yang berkecimpung terlibat dalam konteks Jalan adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kepolisian, BUMN dan Lembaga pendukung lainnya. Simbul-simbul sinergitas sering Nampak pada proyek-proyek insfrastruktur baik berupa jalan, jembatan maupun insfrastruktur transportasi lainnya.Apabila media kemitraan ini berjalan dengan baik dan para operator memiliki jiwa ikhlas dalam mengorbitkan peran-peran persektor institusi, maka kuatlah organisasi Pemerintahan Propinsi Banten.

(2) Bukan Garis Demarkasi.

Apabila implementasi sinergitas mengarah kepada ego-sektor yaitu masing-masing institusi tidak lagi peduli dengan peran-peran institusi lainnya maka yang terjadi adalah “membangun garis demarkasi” seperti apa yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hal ini sering teraplikasi dari pembangunan insfrasrtruktur jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan jalan Kotamadya. Sambungan dalam perbatasan wilayah administrasi yang menghubungkan jalan perbatasan tersebut selalu terputus, tidak tersambung dengan baik sehingga berpotensi cepat rusak, karena masing-masing mengklaim hanya sampai KILOMETER ini tanggung jawabnya. Demikian pula rambu-rambu, marka jalan dan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalulintas) yang berbatasan dengan wilayah

administrasinya kondisinya sangat memprihatinkan (tidak terpasang, rusak, hilang, tidak berfungsi, tidak dirawat). Adalah tugas BPTD untuk meluruskan dan membongkar benteng yang menjadi penghalang sinergitas, karena BPTD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) sesuai Tupoksi nya. Sehingga BPTD memiliki peran meminimalisir ego-sektor dan menghapus garis demarkasi karena kita adalah NKRI.

Kesimpulan & Saran.

A. Kesimpulan.

1. Beberapa Sinergitas yang perlu disinergikan adalah sinergitas kepentingan strategis, sinergitas program, sinergitas geografi, sinergitas regional & internasional serta sinergitas informasi. Dari beberapa sinergitas tersebut perlu dibuat skala prioritas sehingga akan bisa dikketahui sinergitas yang mana yang mudah dan siap diimplementasikan dengan institusi yang setara tupoksinya dilingkungan Propinsi Banten.

2. Terdapat beberapa jenis jabatan fungsional strategis sesuai Permenhub 154/2016 yaitu Jabfung Pengawas Keselamatan Transportasi ASDP, Jabfung Aduministrasi Umum, Jabfung Kelaikan Jalan AU (Terminal) , Jabfung Pengawas Keselamatan Jalan (Patroli Jalan Raya), Jabfung Sarpras Jalan (APIL/Marka/Rambu/Jalan Rusak), Jabfung UPPKB. Jabfung-Jabfung tersebut menjadi sangat dibutuhkan baik pada jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang.

3. Dengan program sinergitas, tingkat kebutuhan tenaga yang trampil (kompeten) harus dikembangkan melalui model kerjasama diklat dengan institusi yang setara Tupoksinya, agar implementasinya sejalan, seiring dan serasi. Hal ini akan menjadi model bahwa Kementerian Perhubungan tidak terjebak pada perilaku egosentris dalam mengimplementasikan program-program kegiatannya. Model ini terkaji adanya korelitas dan linieritas antara Sinergitas, Manajemen Sarpras dan Pengembangan SDM di BPTD Propinsi Banten.

B. Saran

1. Untuk mengimplementasikan sinergitas kegiatan Pengelolaan Transportasi Darat, sangat diperlukan payung Hukum dari Kementerian Perhubungan. Bahkan jika diperlukan bisa dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (Kemenhub, Kemendagri, KemenPU & Perumahan Rakyat, Polri dan Kementerian BUMN).

2. Pelaksanaan Diklat terkait Sinergitas juga dapat dilakukan secara sinergi dari seluruh institusi sebagaimana terebut butir 1 diatas, dimana anggaran Diklat dikoordinasikan/dianggarkan melalui Kementerian Perhubungan.

3. Pada setiap awal atau akhir kegiatan, dapat diselenggarakan Rakornis guna mengetahui kelebihan dan kelemahan yang selama ini diimplementasikan program dan Kegiatan di masing-masing institusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Covey Stephen R (1997) "Kepemmpinan yang berprinsip" Jakarta Binarupa Aksara
2. Sinergitas stakeholders dalam inovasi daerah (media.meneliti.com).
3. Sinergitas antar stakeholders dalam program bantuan Pendidikan masyarakat kota Surakarta (eprints.uns.ac.id)
4. Sinjutas (sinergi – keberlanjutan – tuntas) dalam "Paradoks dan Sinjutas Gerakan Filantropi di Indonesia" Zainal Abidin (2012) Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang
5. Siagian dalam Hadiawan (2006:11) pembinaan bangsa (nation building).
6. Kartasasmita (1994: 121) " suatu proses perobahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
7. Portes dalam Kartasasmita (1994:121)
8. (S.Sumas@nakertrans.go.id)
9. Sinergitas antar stakeholders dalam program bantuan Pendidikan masyarakat kota Surakarta. *Skripsi* Disusun oleh Dyah Rahayu Pratiwi Fak.Ilmu Sospol UNS 2015
10. Sibergitas TNI-Polri wujudkan Masyarakat Aman dan Sejahtera. *Tulisan dalam Kompasiana* oleh Elsana Eko Adiputro 12-September 2017
11. Sinergitas ulama dan Umara dalam perspektif Hadist . *Tesis* disusun oleh Ahmad Mubarok, STh.I UIN Sunankalijaga Yogyakarta 2011
12. Sinergi antar instansi pemerintah dalam implementasi Kebijakan kewirausahaan pemuda. *Tesis* disusun oleh Darmanto UGM 2011
13. Sinergitas stakeholders dalam inovasi daerah. ***Jurnal*** Disusun oleh Triana Rachmawati, Irwan Noor & Ike Wanusmawatie Jurusan Adm.Publik FIA UNBRAW Malang

14. Novia Belladina ( ) “ Koordinasi antara Dinas di Kota Metro Lampung dalam penertiban PKL” skripsi Universitas
15. Yossy Firman Prabawa (2009) Skripsi “Pengaruh Koordinasi & Efektifitas Kerja Karyawan terhadap Kualitas Produk pada CV.Permata 7 Wonogiri”
16. Koordinasi & Rentang Manajemen (eprints.dinus.ac.id).
17. Silvi Rita Jhoirunnisa (2016) Skripsi “ Manajemen Pengembangan SDM dalam meningkatkan Kinerja karyawan di PKPU Cab. Yogyakarta
18. Zaenal Fanani , 2013 (https://www.slideshare.net)) “Manajemen Sarpras”
19. Edward K. Morlok (1978 :93),Pengantar Tehnik dan Perencanaan Transportasi” penerbit Erlangga Jakarta.
20. Jems D Thompsom (dalam Atmosoeprapto,1990 “ Organisasi Dalam Praktek” Penerbit Erlangga.
21. Henry Fayol (1985) dalam “ Industri & Manajemen Umum (terjemahan Winardi, London Sir Isacc & Soon)
22. UU 32 thn 2004 (tentang Pemerintahan Daerah),